

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat krusial bagi perekonomian pasar taraf nasional maupun global. Melalui jumlahnya yang amat besar dan tersebar dalam beragam sektor, UMKM menjadi dasar perekonomian negara untuk menekan kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan masyarakat karena menyerap tenaga kerja. Berkat kemampuan mereka saat beradaptasi terhadap pergeseran pasar dan teknologi, UMKM merupakan kekuatan ekonomi dalam skala global.

Uraian PP RI No. 7 tahun 2021 mengenai Kemudahan, Pengamanan, dan Penguatan Koperasi serta UMKM:

Tabel 1.1 Kriteria UMKM

Usaha Mikro	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Usaha Kecil	Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintahan ini. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

	5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan paling banyak Rp. 15. 000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
Usaha Menengah	Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintahan ini. a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pengelolaan keuangan adalah suatu tantangan dihadapi para pengusaha UMKM saat menjalankan bisnis mereka Winbaktianur & Siregar (2021). Pengelolaan keuangan adalah merencanakan, mengontrol, dan penentuan kebijakan terkait finansial dan peforma finansial merupakan hasil output yang dikeluarkan dari proses pengelolaan keuangan yang di ukur melalui tolak ukur pertumbuhan laba, pertumbuhan aset, pertumbuhan modal, pertumbuhan penjualan (Nguyen et al., 2021).

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengakui bahwa dampak perkembangan perekonomian wilayah telah mulai dirasakan oleh penduduk, sebagaimana terlihat melalui berkurangnya angka kemiskinan, naiknya PDRB, serta membaiknya berbagai indikator ekonomi lainnya. Namun pada

kenyataannya, tidak semua lapisan masyarakat memperoleh manfaat yang seragam. Misalnya, seorang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bernama Erni di kawasan Taman Gurindam 12 menyampaikan bahwa penghasilannya dari aktivitas berdagang mengalami penyusutan besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ia menyatakan bahwa pendapatan harian sebelumnya dapat mencapai sekitar Rp100.000, mencukupi pengeluaran sehari – hari dan bahkan menabung, namun saat ini hanya mampu memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000 hingga Rp55.000 per hari setelah penjualan sepiunya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pendistribusian manfaat pertumbuhan ekonomi, sehingga memerlukan kajian yang lebih komprehensif guna mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhinya (Dimas Bona, 2025)

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM mengalami penurunan tingkat penjualan yang berhubungan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui indikator – indikator seperti profitabilitas yang menurun dapat memperlemah kinerja keuangan UMKM, selain itu UMKM di Kota Tanjungpinang khususnya UMKM yang berada di Tepi laut masih ada yang belum mengadopsi QRIS dalam kegiatan operasional usahanya dikarenakan belum merasa cukup mengoperasikan sistem QRIS secara efektif beberapa di antaranya masih merasa ragu untuk beralih ke sistem digital Shella et al. (2025). Berikut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang mengenai jumlah UMKM yang berada di Kota Tanjungpinang dari 2019 hingga 2024.

Tabel 1.2 Data Pelaku UMKM Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Kelurahan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanjungpinang Timur	Melayu Kota Piring	84	697	760	760	778	789
2	Tanjungpinang Timur	Kampung Bulang	184	434	471	471	480	481
3	Tanjungpinang Timur	Air Raja	383	786	870	870	884	889
4	Tanjungpinang Timur	Batu Sembilan	179	1.821	1.942	1.942	1.956	1984
5	Tanjungpinang Timur	Pinang Kencana	147	1.510	1.566	1.566	1.584	1595
6	Bukit Bestari	Tanjungpinang Timur	398	670	723	723	741	746
7	Bukit Bestari	Tanjung Unggat	340	1.146	1.284	1.284	1.310	1328
8	Bukit Bestari	Dompak	37	166	243	243	249	250
9	Bukit Bestari	Sei Jang	131	909	982	982	1.002	1009
10	Bukit Bestari	Tanjung Ayun Sakti	212	730	807	807	811	818
11	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota	491	133	150	150	150	151
12	Tanjungpinang Kota	Penyengat	251	337	461	461	462	470
13	Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis	167	1.010	1.052	1.052	1.055	1062
14	Tanjungpinang Kota	Senggarang	29	338	352	352	359	359
15	Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat	385	723	829	829	836	839
16	Tanjungpinang Barat	Bukit Cermin	150	622	677	677	684	694
17	Tanjungpinang Barat	Kemboja	213	782	810	810	820	824
18	Tanjungpinang Barat	Kampung Baru	64	678	708	708	712	715
Jumlah			3.845	13.492	14.687	14.687	14.873	15.003

(Sumber: Data BPS, 2025)

Berdasarkan data pelaku UMKM yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang bahwa pelaku UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga menyentuh 15.003 pelaku UMKM yang berada pada kecamatan dan kelurahan yang berbeda beda.

Kinerja keuangan mencerminkan sejauh mana UMKM dapat menghasilkan keuntungan, mempertahankan likuiditas, dan meningkatkan nilai usaha dalam periode tertentu. Penting untuk mengukur kinerja keuangan guna menilai kesehatan dan potensi usaha UMKM.. Kinerja keuangan dapat dinilai oleh beberapa indikator – indikator sehingga dapat dilihat keberhasilan seseorang atau organisasi. Pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan saling terkait erat Winbaktianur & Siregar (2021) dengan begitu pengelolaan keuangan dapat membantu kinerja keuangan untuk melihat pencapaian suatu perusahaan atau entitas, bagi UMKM performa finansial krusial dalam pengambilan keputusan.

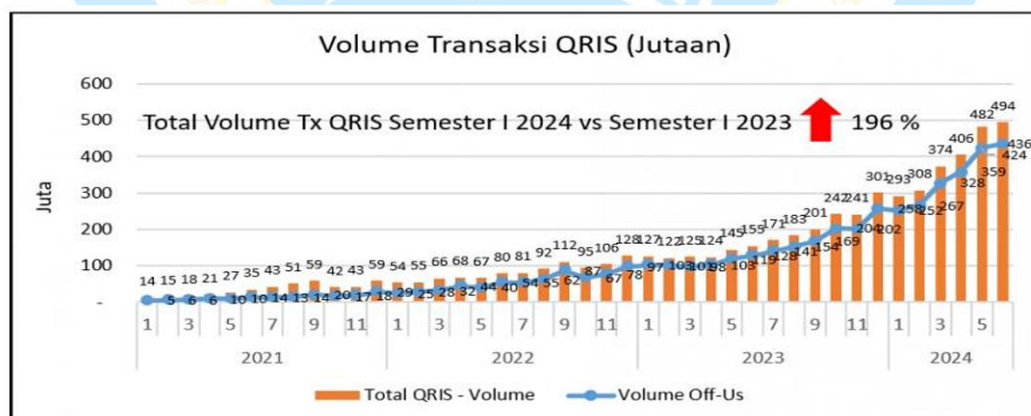
Informasi, kapasitas, serta kepercayaan yang memengaruhi tindakan dan tingkah laku untuk menaikkan mutu penetapan keputusan serta pengaturan finansial guna mencapai kemakmuran ekonomi masyarakat disebut sebagai wawasan literasi keuangan (Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, 2024) Pengelolaan finansial yang sehat merupakan landasan pokok bagi perkembangan bisnis terutama untuk UMKM yang sering mengalami kekurangan sumber daya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui peningkatan literasi keuangan yang mencakup tidak hanya pemahaman dasar mengenai anggaran, tabungan, dan investasi, tetapi kemampuan untuk mengelola risiko keuangan secara efektif di tengah dinamika perekonomian yang tidak stabil. Literasi keuangan merupakan salah satu keharusan bagi para pelaku pengelola dan pemilik UMKM (Gunawan et al., 2023).

Para pelaku UMKM dituntut untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka, pelaku UMKM harus meningkatkan digitalisasi dan literasi keuangan Purnamasari & Asharie (2024). UMKM yang memahami mengenai literasi keuangan biasanya dapat menghindari kesalahan – kesalahan serius seperti kerugian stabilitas keuangan, seperti pengeluaran terencana secara berlebihan. Pada penelitian Anggreani (2024) dan Nurnaluri et al. (2023) bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM, namun dalam penelitian Pareang et al. (2025) dan Fitria et al. (2021) bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM.

Revolusi Industri 4.0, banyak aspek kehidupan UMKM telah berubah, termasuk pergeseran sistem pembayaran dari metode konvensional berbasis tunai

menuju ekosistem digital yang inovatif dan inklusif. Melihat kemajuan sektor industri masa kini tidak bisa dilepaskan dari teknologi informasi, UMKM semestinya sanggup memanfaatkan teknologi informasi Purnamasari & Asharie (2024). Pembayaran digital sebagai metode yang lebih dominan dan disukai saat melaksanakan transaksi sehari-hari (Berlianawati et al., 2026).

Inovasi seperti *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), dompet (e-wallet) seperti GoPay, OVO, dan Dana, serta integrasi pada platform *e-commerce* seperti Shopee atau Tokopedia, memungkinkan UMKM untuk melakukan transaksi dengan cepat, aman, dan tanpa batasan geografis dan mempercepat siklus arus kas. Implementasi QRIS dirancang untuk memudahkan pelaku UMKM dalam menjalankan urusan niaga yang lebih praktis, sigap, terlindungi dan terpercaya. Hadirnya QRIS, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi pembayaran apa pun untuk bertransaksi di berbagai *merchant* yang memiliki logo QRIS, seperti toko, *merchant*, kios, tempat parkir, destinasi wisata, hingga untuk donasi.



Gambar 1.1 Volume Transaksi QRIS 2021 – 2024

Berdasarkan gambar diatas, ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) menyatakan bahwa volume transaksi QRIS pada Juni 2024 tercatat tumbuh 196% dibanding tahun – tahun sebelumnya. Artinya, jika dilihat total volume transaksi QRIS selalu meningkat dari tahun 2021 hingga Juni 2024, di mana total transaksi QRIS tercatat sebesar 494 juta.

Perwujudan sasaran UMKM menuju digitalisasi harus disertai dengan penguatan wawasan keuangan Purnamasari & Asharie (2024) untuk itu perlu nya edukasi mengenai pentingnya literasi keuangan serta mulai mengalihkan UMKM ke sistem digital agar performa keuangan tetap berlangsung baik dan tepat Purnamasari & Asharie (2024). Wardhani et al. (2023) mengadopsi QRIS berdampak kepada kinerja keuangan pelaku UMKM dimana kinerja keuangan terkait dengan jumlah transaksi, omzet penjualan, dan catatan penjualan yang meningkat. Dengan adanya sistem pembayaran digital QRIS pelaku UMKM diharapkan mampu beradaptasi dari pembayaran tunai menjadi non tunai, QRIS dapat menjadi pertimbangan seseorang berbelanja. Sependapat pada studi Riana et al. (2024) dan Wardhani et al. (2023) bahwa penggunaan *digital payment* QRIS memberikan dampak baik pada performa finansial UMKM tetapi berbanding terbalik pada studi Safitri et al. (2023) bahwa *digital payment* QRIS tidak berpengaruh terhadap performa finansial UMKM.

Berdasarkan studi sebelumnya hanya berfokus kepada dampak dari penggunaan *digital payment*, tetapi masih minim penelitian yang membahas dampak menggunakan *digital payment* khususnya QRIS bersamaan dengan variabel kinerja keuangan, untuk itu penelitian ini membahas bagaimana literasi

keuangan dan penggunaan *digital payment* (QRIS) berdampak kepada kinerja keuangan UMKM Kota Tanjungpinang dan dengan adanya fenomena serta latar belakang peneliti menyimpulkan adanya *research gap* yang terjadi sehingga menjadi motivasi peneliti melakukan penelitian ini. Peneliti juga melakukan replikasi penelitian milik Wardhani et al. (2023) “*The Impact of Quick Response Adoption Code on MSMEs’ Finansial Performance in Indonesia*” yang akan dimodifikasi menggunakan variabel independen literasi keuangan dan penggunaan *digital payment* (QRIS) terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Tanjungpinang sebagai variabel dependen.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa pengenalan permasalahan berupa:

1. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kota Tanjungpinang bahwa perekonomian di Kota Tanjungpinang membaik, namun pelaku UMKM justru mengalami penurunan penjualan yang berimbas kepada pendapatan UMKM.
2. Masih banyak pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang yang belum menerapkan QRIS dalam kegiatan operasional usahanya, hal ini juga dapat menyebabkan penurunan pendapatan sehingga mengalami kinerja keuangan yang tidak stabil.
3. Adanya *research gap* berupa perbedaan hasil dari penelitian – penelitian terdahulu dalam meneliti pengaruh literasi keuangan dan penggunaan *digital payment* (QRIS) terhadap kinerja keuangan UMKM.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada sebuah studi, penting untuk membahas masalah yang mendasar dalam menentukan cakupan dan fokus penelitian agar hasil yang diperoleh terarah dan relevan. Dalam penelitian ini perlu membatasi permasalahan agar tidak meluas ke aspek – aspek yang kurang relevan dengan tujuan utama penelitian. Pembatasan persoalan ini juga dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam mengolah data dan mengkaji hasil secara efisien. Dengan demikian, kajian ini hanya berpusat pada aspek – aspek tertentu yang dianggap paling signifikan dalam memahami literasi keuangan pada subjek yang diteliti.

1. Literasi keuangan, akan diukur dengan indikator perencanaan keuangan, anggaran keuangan, pengendalian keuangan, pembukuan keuangan, sumber pendanaan dan informasi bisnis.
2. Penggunaan *digital payment* (QRIS) diukur dengan indikator kemudahan transaksi, peningkatan transaksi, peningkatan profitabilitas.
3. Kinerja Keuangan UMKM, akan diukur dengan indikator pertumbuhan laba, pertumbuhan aset, pertumbuhan modal dan pertumbuhan penjualan.

1.4 Perumusan Masalah

Dapat disimpulkan masalah penelitian ini berupa:

1. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kota Tanjungpinang?
2. Apakah Penggunaan *Digital Payment* (QRIS) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kota Tanjungpinang?

3. Apakah Literasi Keuangan dan Penggunaan *Digital Payment* (QRIS) secara bersamaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kota Tanjungpinang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini dirumuskan guna memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan penelitian serta guna menetapkan bahwa fokus studi tetap terjaga. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik agar bermanfaat:

1. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penggunaan *Digital Payment* (QRIS) terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kota Tanjungpinang.
3. Untuk mengetahui Literasi Keuangan dan Penggunaan *Digital Payment* (QRIS) terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kota Tanjungpinang.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari kajian ini ialah:

1. Manfaat bagi Peneliti

Studi ini dihimbau mampu memperluas pengetahuan peneliti mengenai dampak literasi keuangan dan penggunaan *digital payment* (QRIS) terhadap kinerja keuangan UMKM. Penelitian ini dilakukan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji.

2. Manfaat bagi pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang

Dapat dijadikan panduan meningkatkan literasi keuangan dan menggunakan QRIS guna optimalisasi kinerja keuangan, serta peningkatan pendapatan dan efisiensi transaksi.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Bisa diterapkan sebagai pedoman atau rujukan bagi peneliti selanjutnya.

1.7 Sistematika Penelitian

Susunan kajian ini bertujuan untuk menyajikan uraian yang terang dan teratur untuk pembaca dalam mengerti kajian ini. Setiap bagian secara umum mampu dijabarkan:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pertama ini Informasi, kapasitas, serta kepercayaan yang memengaruhi tindakan dan tingkah laku untuk menaikkan mutu penetapan keputusan serta pengaturan finansial guna mencapai kemakmuran ekonomi masyarakat disebut sebagai wawasan finansial

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua di dalamnya mengemukakan serta menguraikan mengenai aspek - aspek yang melandasi penelitian ini yang mencakup konsep - konsep akademik yang berhubungan dengan kajian ini, temuan studi terdahulu yang sesuai sebagai acuan

dalam penyusunan skripsi dan alur pemikiran sebagai tanggapan secara teoritis atas persoalan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan desain kajian, pelaksanaan variabel riset, cara penetapan populasi dan sampel, metode pengumpulan data serta teknik pengolahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan gambaran satuan analisis atau pengamatan, temuan kajian, serta pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian ini memuat kesimpulan berdasarkan studi yang sudah dikaji serta rekomendasi dalam kajian.